

MANAJEMEN ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BALANGAN

Sri Agusmila Anetha Herlinda¹

Email : agusmila20202@gmail.com

Fitiani²

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

ABSTRAK

Permasalahan berkaitan dengan Manajemen Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan meliputi penatausahaan arsip dan data aset tetap yang kurang terkoordinir, pengawasan yang kurang optimal dari pimpinan dan terbatasnya jumlah petugas pengelola aset tetap yang berkompeten. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Manajemen Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan dan faktor yang mempengaruhinya.

Metode Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian Teknik penarikan informan yaitu *Purposive Sampling* sebanyak 10 orang. Uji kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, menggunakan bahan referensi dan *membercheck*.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Manajemen Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan cukup baik dilihat dari beberapa aspek yakni: *Pertama*, Inventarisasi Aset dengan indikator inventarisasi fisik dinilai kurang baik, kemudian untuk Legalitas Kepemilikan tergolong baik. *Kedua*, Legal Audit dengan indikator kejelasan kepemilikan tergolong baik, kemudian untuk pemeriksaan penguasaan atau pemindahtanganan dinilai sudah baik. *Ketiga*, Penilaian Aset dengan indikator Pengukuran kelayakkan aset dinilai sudah baik, kemudian untuk kerjasama dengan pihak independent sudah baik. *Keempat*, Optimalisasi Aset dengan indikator Pemisahan aset berpotensi dan tidak berpotensi dinilai kurang baik, kemudian untuk pemanfaatan Aset dinilai sudah baik, *Kelima*, Pengawasan dan Pengendalian dengan indikator pengawasan aset dinilai sudah baik, kemudian untuk pengendalian Aset dinilai sudah baik. Faktor yang mempengaruhi manajemen Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan meliputi factor penghambat yakni Pemeliharaan Aset yang kurang optimal karena upaya pemeliharaan yang kurang rutin, belum adanya petugas khusus dalam pemeliharaan aset dan Pengendalian aset yang sudah kadaluarsa masih belum teratur sesuai dengan ketentuan, kemudian faktor yang mendorong meliputi kondisi sarana dan prasarana dalam pengelolaan aset tergolong baik dan memadai dilihat dari aspek ketersediaan Gedung penyimpanan dan peralatan penunjang dalam inventarisasi seperti komputer, printer dan lain sebagainya.

Agar Manajemen Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan terlaksana secara optimal, disarankan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset

Daerah Kabupaten Balangan menambah petugas khusus untuk mengelola asset dan Pegawai lebih aktif melakukan pemeriksaan kondisi aset.

ABSTRACT

Problems related to Fixed Asset Management at the Balangan Regency Revenue and Regional Asset Finance Management Agency include uncoordinated administration of fixed asset records and data, less than optimal supervision from leaders and the limited number of competent fixed asset management officers. The purpose of this study was to find out the Fixed Asset Management at the Balangan Regency Revenue and Regional Financial Management Agency and the factors that influence it.

The research method uses a qualitative descriptive method. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. Then the informant withdrawal technique is Purposive Sampling of 10 people. Data credibility tests include extending observations, increasing persistence, using reference materials and member checking.

The results of this study state that the management of fixed assets at the Balangan Regency Revenue and Regional Asset Financial Management Agency is quite good in terms of several aspects, namely: First, the Asset Inventory with physical inventory indicators is considered not good, then the Legality of Ownership is classified as good. Second, the Legal Audit with an indicator of clear ownership is classified as good, then for examination of control or transfer it is considered good. Third, Asset Valuation with indicators of measuring feasibility of assets is considered good, then for cooperation with independent parties it is already good. Fourth, Asset Optimization with indicators of separation of potential and non-potential assets is considered poor, then Asset utilization is considered good. Fifth, Supervision and Control with asset monitoring indicators is considered good, then Asset control is considered good. Factors influencing the management of Fixed Assets at the Balangan Regency Revenue and Regional Asset Financial Management Agency include inhibiting factors, namely Asset Maintenance which is less than optimal due to less routine maintenance efforts, there is no special officer in asset maintenance and Control over expired assets is still not organized in accordance with provisions, then the driving factors include the condition of facilities and infrastructure in managing assets that are classified as good and adequate in terms of the availability of storage buildings and supporting equipment in inventory such as computers, printers and so on.

In order for the Management of Fixed Assets at the Balangan Regency Regional Revenue and Asset Financial Management Agency to be carried out optimally, it is suggested to the Head of the Balangan Regency Regional Revenue and Asset Financial Management Agency to add special officers to manage assets and employees to be more active in checking asset conditions.

PENDAHULUAN

Pengelolaan aset daerah menjadi salah satu hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta penciptaan akuntabilitas publik. Artinya bahwa upaya melakukan pengelolaan aset daerah secara baik merupakan salah satu upaya yang diasumsikan dapat menciptakan *good local governance*. Hal ini telah dikemukakan secara teoritis di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dengan tujuan agar aset daerah dapat dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Sebagai pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah (BMD), Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam penjelasan Permendagri tersebut dikemukakan bahwa dikeluarkannya pedoman teknis itu didorong oleh suatu keinginan agar pengelolaan BMD dilakukan dengan baik dan benar, mengingat BMD merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting dalam Pemerintah Daerah, karena aset tetap memiliki nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca

lainnya. Implementasi dalam pengelolaan aset tetap secara efektif dan efisien akan memberikan kontribusi yang terbaik terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dari suatu Pemerintah Daerah. Meskipun dalam pengelolaan aset tetap pada setiap Pemerintah Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, namun pada pelaksanaannya masih banyak ditemukan permasalahan dan kendala yang dijumpai, hal tersebut dapat menghambat proses kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

Jenis-jenis aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan antara lain adalah properti, bangunan, pabrik, alat-alat produksi, mesin, kendaraan bermotor, furnitur, perlengkapan kantor, komputer, dan lain-lain. Adapun kendala yang dihadapi dalam manajemen aset tetap tersebut meliputi penginventarisasian aset dan keterbatasan sarana prasarana penunjang seperti komputer khusus untuk penginventarisasian aset dan petugas khusus untuk mengelola aset tetap tersebut.

Berdasarkan pengamatan penulis di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan selama ini dalam manajemen aset masih tergolong belum optimal, hal tersebut dilihat dari beberapa aspek permasalahan yang ditemui, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penatausahaan arsip dan data aset tetap yang kurang terkoordinir secara optimal sehingga arsip/berkas tidak teratur penyimpanannya khususnya dalam hal penginventarisasian aset

seperti dibutuhkannya lemari arsip dan komputer khusus untuk data inventaris aset dapat diketahui bahwa Ruang Arsip tergolong sempit dan untuk menampung arsip-arsip kurang memadai serta pengaturan posisi lemari/ brankas juga kurang teratur. (*Observasi Awal pada Hari/Tanggal: Senin 22 Agustus 2022*)

2. Pengawasan yang kurang optimal dari pimpinan dalam pengelolaan aset tetap daerah seperti peninjauan terhadap nilai aset yang menyusut nilainya sehingga apabila sudah kadaluarsa dapat dimusnahkan. (*Berita Acara Evaluasi Kerja BPKPAD Kab. Balangan Bulan Agustus Tahun 2022*)
3. Terbatasnya jumlah petugas pengelola aset tetap yang berkompeten di bidangnya dilihat dari aspek latar belakang Pendidikan maupun kompetensi lainnya yang berfokus untuk mengelola atau menginventaris aset. (*Berita Acara Evaluasi Kerja BPKPAD Kab. Balangan Bulan Agustus Tahun 2022*)

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengambil judul penelitian yaitu ***“Manajemen Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Balangan”***.

RUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Manajemen Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Balangan?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Manajemen Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Manajemen Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Manajemen Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat teoritis dari aspek keilmuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk pengembangan berbagai teori yang sangat berguna bagi pengembangan pemahaman, penalaran, pengalaman peneliti khususnya dalam bidang ilmu administrasi negara khususnya pada manajemen aset daerah.
- b. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari proses pengambilan keputusan Kantor Badan Pengelolaan

Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.

Tinjauan Teoritis

1. Konsep Manajemen

a. Pengertian

Istilah manajemen dalam kehidupan masyarakat dewasa ini bukanlah merupakan istilah atau masalah baru. Manajemen berasal dari kata “*to manage*” yang berarti mengelola aktifitas-aktifitas sekelompok orang agar dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut Usman dalam Rohman (2017:7) kata “manajemen” berasal dari bahasa latin “*manus*” yang berarti “tangan” dan “*agere*” yang berarti “melakukan”. Dari dua kata tersebut dengan arti masing-masing yang terkandung di dalamnya merupakan arti secara *etimologi*. Selanjutnya kata “*manus*” dan “*agere*” digabung menjadi satu kesatuan kata kerja “*managere*” yang mengandung arti “menangani”. Pengertian ini dalam ilmu ketatabahasa disebut sebagai pengertian secara *terminologi*. “*Managere*” diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja menjadi “*to manage*” dengan kata benda “*management*”. Julukan bagi orang yang melakukan kegiatan *managenent* disebut *manager* atau manajer (dalam bahasa Indonesia). sedangkan dalam bahasa Prancis disebut “*ménagement*” yang berarti seni

melaksanakan dan mengatur. Kata “*management*” dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi manajemen, yang mengandung arti “pengelolaan”.

Secara umum pengertian manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Maria Ulfa. 2022. *Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli dan Prinsip-Prinsipnya (Online)*. Tersedia:

<https://tirto.id/pengertian-manajemen-menurut-para-ahli-dan-prinsip-prinsipnya-gnS6>. Diakses tanggal 26 Oktober 2022.

Tujuan-tujuan yang telah ditetapkan akan dapat tercapai apabila manajemen (pengelolaan) sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dijalankan secara baik. Untuk mengatakan bahwa manajemen dijalankan secara baik dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan, maka harus dilihat dari fungsi-fungsinya yang berjalan secara baik. Apabila fungsi-fungsi manajemen dijalankan dengan baik, maka tentunya manajemen dalam upaya pencapaian tujuan dilakukan dengan baik. Sebaliknya, apabila fungsi-fungsi manajemen yang ada tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka dapat disimpulkan bahwa

manajemen yang ada juga tidak baik.

2. Manajemen Aset

Manajemen aset daerah dalam Keputusan Mendagri Nomor 19/2016 dinyatakan sebagai, rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.

Efektivitas berasal dari kata kerja efektif, berarti terjadinya suatu akibat atau efek yang dihendaki dalam perbuatan. setiap pekerjaan yang Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi terhadap pengelolaan barang daerah perlu diatur pedoman kerjanya, untuk itu telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 (pembaruan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah).

3. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal entitas perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK No.16 (2012:16.2), adalah "Aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode."

Menurut Hery (2014:121) "Aset Tetap (*Fixed Assets*) adalah aset yang secara fisik dapat dilihat keberadaannya dan sifatnya relatif permanen serta memiliki masa kegunaan (*useful life*) yang panjang. Aset tetap merupakan aset berwujud (*tangible asset*). Berbeda dengan aset tidak berwujud (*intangible asset*), yang dimana tidak dimiliki wujud fisik dan dihasilkan sebagai akibat dari sebuah kontrak hukum, ekonomi, maupun kontrak sosial".

4. Aset Daerah/Barang Daerah

Menurut Halim (2012:117) Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemerintah, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dinilai dengan satuan mata uang dan digunakan dalam operasional pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 7 Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh.

Berdasarkan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam penyelenggaraan pemerintah negara/daerah, aset merupakan salah satu unsur penting yang harus dikelola dengan baik untuk menunjang kegiatan operasional. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penelitian ini akan dijelaskan melalui teori yang dikemukakan oleh Siregar dalam Darwis (2019:43), terdapat lima tahapan manajemen aset yaitu, sebagai berikut:

1. Inventarisasi Aset
2. Legal Audit
3. Penilaian Aset
4. Optimalisasi Aset
5. Pengawasan dan Pengendalian

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi,

wawancara dan dokumentasi. Kemudian Teknik penarikan informan yaitu *Purposive Sampling* sebanyak 10 orang. Uji kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, menggunakan bahan referensi dan *membercheck*.

Hasil dan Pembahasan

1. Manajemen Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan

a. Inventarisasi Aset

1) Inventarisasi Fisik

inventarisasi fisik kurang terkoordinir secara optimal sehingga arsip tidak teratur penyimpanannya khususnya dalam penginventarisasian aset seperti dibutuhkan lemari arsip dan komputer khusus untuk data inventaris aset diketahui bahwa Ruangan Arsip tergolong sempit dan untuk menampung arsip kurang memadai serta pengaturan posisi lemari juga kurang teratur.

2) Legalitas Kepemilikan

Proses inventarisasi aset sudah tergolong baik melalui tahapan proses yang sesuai dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah seperti pengajuan

hingga penetapan melalui Surat Keputusan Bupati.

b. Legal Audit

1) Kejelasan Kepemilikan

Proses penetapan kepemilikan aset sudah melalui tahapan proses yang sesuai dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah seperti pengajuan hingga penetapan melalui Surat Keputusan Bupati.

2) Pemeriksaan penguasaan atau pemindahtanganan

Legal audit terkait Pemeriksaan penguasaan atau pemindahtanganan aset dilakukan agar status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan aset menjadi legal hal tersebut dilakukan secara berkala sesuai dengan statusnya.

c. Penilaian Aset

1) Pengukuran kelayakkan aset

Pengukuran aset adalah jumlah rupiah yang dilekatkan pada aset yang dimiliki dan akan dijadikan dasar untuk mengikuti aliran fisik aset tersebut. Jumlah rupiah melekat pada aset ini disebut jumlah setara tunai atau implisit dari wujud penghargaan yang diserahkan oleh pemeroleh aset dan proses pengukuran ini dilakukan bekerjasama

dengan pihak legal audit eksternal.

2) Kerjasama dengan pihak independen

Pengukuran nilai aset dilakukan dengan prosedur dan taksiran nilai bekerjasama dengan pihak *Independent appraiser* yakni Rao, Yuhel & Rekan sebagai Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dengan No Ijin KJPP 1133/KM.1/2011 yang berdomisili di Jakarta.

d. Optimalisasi Aset

1) Pemisahan aset berpotensi dan tidak berpotensi

Pemisahan aset berpotensi dan tidak berpotensi masih kurang optimal dikarenakan data dan penempatannya masih tercampur dan belum disortir secara optimal.

2) Pemanfaatan Aset

Pemanfaatan aset daerah dilakukan atas dasar rekomendasi dari pihak yang menyerahkan Surat Permohonan Pemanfaatan Aset kepada Bupati kemudian dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan melakukan tindak lanjut.

e. Pengawasan dan Pengendalian

1) Pengawasan Aset

Pengawasan dilakukan melalui tahap pemeriksaan data aset dan kemudian peninjauan aset secara fisik.

2) Pengendalian Aset

Pengendalian aset yang dilakukan adalah melalui pemeriksaan berkas secara berkala dan pemeriksaan fisik aset agar diketahui perkembangan atau terjadinya penyusutan terhadap aset tersebut selain itu pengendalian dilakukan agar penggunaan aset sesuai dengan ketentuan.

sudah kadaluarsa masih belum teratur sesuai dengan ketentuan.

b. Faktor Yang Mendorong

1) Tersedianya sarana prasarana yang memadai

Ketersediaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan aset daerah tergolong baik dan memadai dilihat dari adanya Gedung penyimpanan dan peralatan penunjang dalam inventarisasi seperti komputer dan lain sebagainya.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.

a. Faktor Penghambat

1) Pemeliharaan Aset yang kurang optimal

Prosedur pemeliharaan aset masih kurang optimal dalam pelaksanaannya seperti pemeriksaan yang kurang rutin dilakukan, penentuan indeks, penentuan kode, pelabelan, maupun tempat penyimpanan yang kurang tersedia.

2) Belum adanya petugas khusus dalam pemeliharaan aset

Kurang memadainya sumber daya pengelolaan aset menyebabkan kurangnya ketersediaan data yang lengkap bila dibutuhkan, seperti sulitnya menemukan kembali arsip, karena masih menggunakan metode manual dan tidak berurutan disesuaikan dengan kode aset dan Pengendalian aset yang

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Manajemen Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan cukup baik dilihat dari beberapa aspek yakni: *Pertama*, Inventarisasi Aset dengan indikator inventarisasi fisik dinilai kurang baik, kemudian untuk Legalitas Kepemilikan tergolong baik. *Kedua*, Legal Audit dengan indikator kejelasan kepemilikan tergolong baik, kemudian untuk pemeriksaan penguasaan atau pemindahtanganan dinilai sudah baik. *Ketiga*, Penilaian Aset dengan indikator Pengukuran kelayakkan aset dinilai sudah baik, kemudian untuk kerjasama dengan pihak independent sudah baik. *Keempat*, Optimalisasi Aset dengan indikator Pemisahan aset berpotensi dan tidak berpotensi dinilai kurang baik, kemudian untuk pemanfaatan Aset dinilai sudah baik, *Kelima*, Pengawasan dan Pengendalian dengan indikator pengawasan aset dinilai sudah baik, kemudian untuk pengendalian Aset dinilai sudah baik. Faktor yang mempengaruhi manajemen Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan meliputi factor penghambat yakni Pemeliharaan Aset yang kurang optimal karena upaya pemeliharaan yang kurang rutin, belum adanya petugas khusus dalam pemeliharaan aset dan Pengendalian aset yang sudah kadaluarsa masih belum teratur sesuai dengan ketentuan, kemudian faktor yang mendorong meliputi kondisi sarana dan prasarana dalam pengelolaan aset tergolong baik dan memadai dilihat dari aspek ketersediaan Gedung penyimpanan dan peralatan penunjang dalam inventarisasi seperti komputer, printer dan lain sebagainya.

Saran

Agar Manajemen Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan terlaksana secara optimal, disarankan kepada:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan menambah petugas khusus untuk mengelola aset dari tahapan pendataan hingga perawatan aset selain itu perlu ditambah sistem komputer yang memudahkan penginventarisasian aset daerah agar terintegritas.
2. Pegawai lebih aktif melakukan pemeriksaan kondisi aset agar dapat disortir aset yang berpotensi dengan aset yang sudah tidak memiliki nilai potensi.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2019. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

_____, 2020. Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.

_____, 2016. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (*Permendagri*) Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*

_____, Peraturan Bupati Balangan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Anggara, Sahya, 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta Pustaka Setia.

Amirullah. 2015. *Pengantar Manajemen Fungsi-Proses-Pengendalian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Darwis. 2019. *Manajemen Asset dan Liabilitas*. Trust Media Publishing, Yogyakarta

Fahmi, Irham, 2012. *Manajemen Produksi dan Operasi*. Alfabeta, Bandung.

Hadinata, Acep. 2012. *Bahan Ajar Manajemen Aset*. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Jakarta

- Krisnandi, Herry. 2019. *Pengantar Manajemen*. LPU-UNAS. Jakarta Selatan
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Rendra Fransiskus Arie. 2017. "Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Di Kabupaten Sanggau". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
- Rohman, Abd. 2017. *Dasar-Dasar Manajemen*. Inteligencia Media. Malang
- Semiawan, Conny R. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Grasindo.
- Setiyocono, Budi, 2014. *Pemerintah dan Manajemen Sektor Publik*, CAPS, Yogyakarta.
- Sugijama, A. Gima. 2013. *Manajemen Aset Pariwisata Bandung: Guardaya Intimarta*.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Tim. 2022. Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Strata 1 (S1) STIA Amuntai.
- Ulfa, Maria. 2022. *Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli dan Prinsip-Prinsipnya (Online)*. Tersedia: <https://tirto.id/pengertian-manajemen-menurut-para-ahli-dan-prinsip-prinsipnya-gnS6>. Diakses tanggal 26 Oktober 2022.
- Yuli, Marsita. 2020. "Manajemen Aset Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau". Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak